



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 23 bulan September Tahun 2022;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Banyuwangi dan Daerah Tingkat II Banyuwangi dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245)
6. Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114)
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri

- Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
 22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Tahun 2022 nomor 837);
 23. Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 41 tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2022 Nomor 41);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007 Nomor 10/E) sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 9);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 Nomor 1);
27. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 14 tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2022 nomor 14)

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI
Dan
BUPATI BANYUWANGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

6. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
7. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
8. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
9. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
10. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
11. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
12. Pendapatan Asli Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.
13. Pendapatan Transfer atau Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
14. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
15. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

16. Belanja pegawai adalah jenis belanja yang digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain berupa gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, dan honorarium.
17. Belanja barang dan jasa adalah jenis belanja yang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga, antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (availability payment), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat.
18. Belanja hibah adalah jenis belanja yang diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Belanja bantuan sosial adalah jenis belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

20. Belanja operasi adalah jenis belanja yang digunakan untuk menganggarkan Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, antara lain: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.
21. Belanja modal adalah jenis belanja yang digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
22. Belanja tidak terduga adalah jenis belanja yang digunakan untuk pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.
23. Belanja transfer adalah jenis belanja yang digunakan untuk pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa, antara lain: belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan

Pasal 2

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

1.	Semula	Rp.	2.989.972.508.530,00
2.	Bertambah	Rp.	190.130.135.775,19
Jumlah Pendapatan Daerah Setelah Perubahan			Rp. 3.180.102.644.305,19

b. Belanja Daerah

1.	Semula	Rp.	3.005.972.508.533,00
2.	Bertambah	Rp.	552.941.241.120,35
Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan			Rp. 3.558.913.749.653,35
Surplus/(Defisit)			Rp. (378.811.105.348,16)

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Pembiayaan			
a)	Semula	Rp	25.000.000.000,00
b)	Bertambah	Rp	362.811.105.348,16
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan			Rp 387.811.105.348,16
2. Pengeluaran Pembiayaan senilai Rp. 9.000.000.000,00			
Jumlah Pembiayaan Neto Setelah Perubahan			Rp 378.811.105.348,16
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan			Rp 0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1.	Semula	Rp.	518.001.960.940,00	
2.	Bertambah	Rp.	8.715.000.000,00	
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp.		526.716.960.940,00

b. Pendapatan transfer

1.	Semula	Rp.	2.408.739.805.597,00	
2.	Bertambah	Rp.	92.252.447.288,00	
	Jumlah Pendapatan Transfer setelah Perubahan	Rp.		2.500.992.252.885,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1.	Semula	Rp.	63.230.741.993,00	
2.	Bertambah	Rp.	89.162.688.487,19	
	Jumlah Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan	Rp.		152.393.430.480,19

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah

1.	Semula	Rp.	202.758.444.611,00	
2.	Bertambah	Rp.	99.533.000,00	
	Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan	Rp.		202.857.977.611,00

b. Retribusi Daerah

1.	Semula	Rp.	73.860.633.767,00	
2.	Bertambah	Rp.	3.120.000,00	
	Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp.		73.863.753.767,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan senilai Rp. 25.000.000.000,00.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1.	Semula	Rp.	216.382.882.562,00	
2.	Bertambah	Rp.	8.612.347.000,00	
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah perubahan	Rp.		224.995.229.562,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer Pemerintah Pusat

1.	Semula	Rp.	2.300.079.443.000,00	
2.	Bertambah	Rp.	<u>53.896.841.000,00</u>	
	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Setelah Perubahan	Rp.		2.353.976.284.000,00

b. Transfer Antar Daerah

1.	Semula	Rp.	108.660.362.597,00	
2.	Bertambah	Rp.	<u>38.355.606.288,00</u>	
	Jumlah Transfer Antar Daerah setelah Perubahan	Rp.		147.015.968.885,00

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:

a. Pendapatan Hibah.

1.	Semula	Rp.	11.982.000.000,00	
2.	Bertambah	Rp.	<u>88.729.556.775,19</u>	
	Jumlah Pendapatan Hibah Setelah Perubahan	Rp.		100.711.556.775,19

b. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

1.	Semula	Rp.	51.248.741.993,00	
2.	Bertambah	Rp.	<u>433.131.712,00</u>	
	Jumlah Pendapatan Hibah Setelah Perubahan	Rp.		51.681.873.705,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:

a. Belanja Operasi

1.	Semula	Rp.	2.070.759.313.951,00	
2.	Bertambah	Rp.	<u>345.346.321.232,35</u>	
	Jumlah Belanja Operasi Setelah Perubahan	Rp.		2.416.105.635.183,35

b. Belanja Modal

1.	Semula	Rp.	504.235.179.417,00	
2.	Bertambah	Rp.	<u>207.574.919.888,00</u>	
	Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp.		711.810.099.305,00

c.	Belanja Tidak Terduga			
1.	Semula	Rp.	20.000.000.000,00	
2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00	
	Jumlah Tidak Terduga Setelah Perubahan			Rp. 20.000.000.000,00
d.	Belanja Transfer			
1.	Semula	Rp.	410.978.015.165,00	
2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	20.000.000,00	
	Jumlah Belanja Transfer setelah Perubahan			Rp. 410.998.015.165,00

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri dari:

a.	Belanja Pegawai			
1.	Semula	Rp.	922.468.149.121,00	
2.	Bertambah	Rp.	186.204.329.408,35	
	Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan			Rp. 1.108.672.478.529,35
b.	Belanja Barang dan Jasa			
1.	Semula	Rp.	999.041.095.330,00	
2.	Bertambah	Rp.	97.995.126.824,00	
	Jumlah Belanja barang dan jasa Setelah Perubahan			Rp. 1.097.036.222.154,00
c.	Belanja Hibah			
1.	Semula	Rp.	134.938.069.500,00	
2.	Bertambah	Rp.	60.993.865.000,00	
	Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan			Rp. 195.931.934.500,00
d.	Belanja Bantuan Sosial			
1.	Semula	Rp.	14.312.000.000,00	
2.	Bertambah	Rp.	153.000.000,00	
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan			Rp. 14.465.000.000,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri dari:

a.	Belanja Modal Tanah			
1.	Semula	Rp.	11.530.000.000,00	
2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	2.873.700.000,00	
	Jumlah Belanja Modal Tanah Setelah Perubahan			Rp. 14.403.700.000,00

b.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			
1.	Semula	Rp.	97.271.544.980,00	
2.	Bertambah	Rp.	38.513.018.075,00	
	Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Setelah Perubahan			Rp. 135.784.563.055,00
c.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan			
1.	Semula	Rp.	96.919.634.537,00	
2.	Bertambah	Rp.	31.472.090.258,00	
	Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan			Rp. 128.391.724.795,00
d.	Belanja Modal Jalan, jaringan, dan Irigasi			
1.	Semula	Rp.	287.863.040.345,00	
2.	Bertambah	Rp.	137.201.506.956,00	
	Jumlah Belanja Modal Jalan, jaringan, dan Irigasi setelah perubahan			Rp. 425.064.547.301,00
e.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya			
1.	Semula	Rp.	10.650.959.555,00	
2.	Berkurang	Rp.	(2.485.395.401,00)	
	Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan			Rp. 8.165.564.154,00
(3)	Belanja tidak terduga			
1.	Semula	Rp.	20.000.000.000,00	
2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00	
	Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan			Rp. 20.000.000.000,00
(4)	Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri dari			
a.	Belanja Bagi Hasil			
1.	Semula	Rp.	20.193.979.415,00	
2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00	
	Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan			Rp. 20.193.979.415,00
b.	Belanja Bantuan Keuangan			
1.	Semula	Rp.	390.784.035.750,00	
2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	20.000.000,00	
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan			Rp. 390.804.035.750,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan

1.	Semula	Rp.	25.000.000.000,00	
2.	Bertambah	Rp.	362.811.105.348,16	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp.		387.811.105.348,16

b. Pengeluaran Pembiayaan

1.	Semula	Rp.	9.000.000.000,00	
2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp.		9.000.000.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, adalah:

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1.	Semula	Rp.	25.000.000.000,00	
2.	Bertambah	Rp.	362.811.105.348,16	
	Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya Setelah Perubahan	Rp.		387.811.105.348,16

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b, adalah:

Penyertaan modal daerah

1.	Semula	Rp.	9.000.000.000,00	
2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00	
	Jumlah Penyertaan modal daerah Setelah Perubahan	Rp.		9.000.000.000,00

Pasal 9

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2022;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis

Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 ;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Tahun Anggaran 2022;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2022;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan Tahun Anggaran 2022;
7. Lampiran VII Daftar piutang daerah Tahun Anggaran 2022;
8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya Tahun Anggaran 2022;
9. Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah Tahun Anggaran 2022;
10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain Tahun Anggaran 2022;
11. Lampiran XI Daftar sub kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan Kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan Tahun Anggaran 2022;
12. Lampiran XII Daftar dana cadangan Tahun Anggaran 2022; dan;
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2022;

Pasal 10

Bupati Banyuwangi menetapkan Peraturan Bupati Banyuwangi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 11

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 27 Oktober 2022

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 27 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI

Ttd.

H. MUJIONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2022 NOMOR 5

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

AKHMAD SAEHO.SE
Pembinta Tingkat I
NIP. 196802021996021002